



Ahok Terhina Beli Sayur Diaudit BPK

► Tantang Pejabat BPK Buka-bukaan Harta ► Ketua BPK: Jangan Asal Ngomong

Balai Kota, Warta Kota

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram terhadap cara kerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinilai tidak profesional. Ia semakin geram karena sejumlah auditor BPK merasa seperti (Tuhan) Yang Maha Kuasa (YMK) di republik ini. Ahok pun merasa terhina karena beli sayur saja sampai diaudit BPK.

Kegeraman Ahok itu ditunjukkan di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/7), merespon hasil audit BPK yang disandang sejumlah daerah dengan predi-

kat wajar tanpa pengecualian (WTP), tapi kemudian kepala daerahnya malah terlibat korupsi. Ahok pun tidak terima Pemprov DKI mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan BPK.

Orang nomor satu di Ibu Kota itu kemarin kembali berbicara meledak-ledak. Dengan muka serius, bahkan Ahok merasa terhina ada auditor BPK yang bertanya soal uang belanja sayur sehari-hari. "Jangan BPK merasa kayak (Tuhan) YMK saja di republik ini," ucap Ahok dengan mimik serius.

Ahok sebenarnya tidak mau peduli opini yang disematkan BPK terhadap Pemprov DKI atas laporan keuangan tahun 2014. Menurutnya, tidak sedikit juga daerah yang mendapat opini baik sekalipun, ternyata dipimpin oleh kepala daerah bermasalah.

"Daerah yang dapat

(opini) WTP itu apa? Ada kepala daerah dapat predikat WTP, masuk penjara juga. Saya mau tahu, biar kita secara terbuka menyelesaikan masalah di republik ini sama-sama beres," jelas Ahok.

Ahok mempersilakan lembaga tinggi negara itu mengaudit keuangan Pemprov DKI secara tuntas. Bila perlu termasuk mengaudit dirinya sekaligus. Tetapi, Ahok juga meminta agar auditor BPK menggunakan standarisasi audit yang sama untuk semua daerah.

"Mulai sekarang periksa saja Pemprov DKI sekencang mungkin. Silakan periksa, kalau perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi, saya akan menuntut seluruh kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama, sesuai yang disampaikan BPK," tegasnya.

Dari dulu

Mantan bupati Belitung Timur ini berkomentar keras terhadap opini WDP BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014. Pasalnya, kata Ahok, kesalahan-kesalahan yang ditemukan BPK itu sudah terjadi sejak era Gubernur Fauzi Bowo yang justru mendapat opini WTP. Ia meminta BPK memeriksa serta mengaudit seluruh laporan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD) DKI sesuai standar audit.

Laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014 mendapat opini WDP 2014 dari BPK. Lembaga audit negara ini mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan DKI senilai Rp 2,16 triliun. Temuan BPK itu terdiri

dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.

Temuan BPK lainnya berupa kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

BPK lantas menyoroti beberapa temuan yang wajib menjadi perhatian Pemprov DKI. Temuan BPK itu adalah aset seluas 30,88 hektar di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset. Selain itu, ada pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang tidak melewati proses pengadaan memadai. Indikasi kerugiannya sebesar Rp 191 miliar.

Pemprov DKI juga mengalami kelebihan bayar biaya premi asuransi senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar.

Temuan lain yang perlu diwaspadai Pemprov DKI adalah penyertaan modal dan aset ke PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai ketentuan. Hal ini menyangkut tanah seluas 794.000 m², bangunan seluas 234 m², dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal ke BUMD.

Pembuktian terbalik

Ahok menantang semua anggota BPK untuk membuktikan pajak yang dibayar serta melaporkan seluruh harta kekayaan dalam laporan har-

ta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK. Ahok mengaku ingin mengetahui apakah semua anggota BPK benar-benar bersih dan bebas dari korupsi.

"Saya menantang semua pejabat di BPK. Bila perlu, buktikan pajak yang mereka bayar, harta mereka berapa, biaya hidup berapa, anak-anak mereka kuliah di mana? Saya mau tahu semuanya. Kalau enggak bisa membuktikan, ya enggak boleh jadi anggota BPK. Dan mereka enggak boleh memeriksa orang karena dia sendiri bermasalah," kata Ahok.

Dia melanjutkan, petugas auditor BPK sampai memeriksa uang untuk membeli sayur-mayur. "Saya mau tanya (uang) operasional menteri-menteri diperiksa sampai uang cabai dan beras enggak? Ada oknum BPK tanya uang beli cabai berapa, sayur berapa, dan beras berapa. Gila... hina sekali," ucap Ahok.

Karena itu, Ahok meminta anggota BPK melakukan pembuktian harta terbalik. Hal itu berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

"Ini saya buka. Mana kemarin saya enggak dikasih ngomong (untuk protes opini WDP) dalam rapat paripurna DPRD," kata Ahok.

Ahok mengaku sudah merinci kebutuhan seperti yang diminta sampai ke level terendah. "Sekarang lebih gila lagi. Uang makan saya yang nggak pernah dikatak-katik BPK, sekarang diincar. Gubernur gaji berapa sih Rp 7 juta, uang makan rumah tangga Rp 50-



RP 60 juta. Sekarang diminta merinci uang cabai dan sayur berapa," terang Ahok.

Asal tuding

Secara terpisah, Ketua BPK Hary Azhar Azis meminta Ahok tak asal tuding. Hary meminta Ahok menyebut nama kepala daerah yang daerahnya mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) tapi masuk bui.

"Siapa kepala daerah itu? Sebut dong. Saya tak bisa berkomentar apapun kalau begitu (asal tuding). Nggak bisa asal tembak," kata Hary menyindir Ahok di Jakarta, kemarin.

Hary meminta Ahok yang pertama kali menyoal hasil audit WTP menyebut jelas nama kepala daerah yang dimaksud. "Jangan asal ngomong saja, setiap omongan harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sementara itu, rencana Pemprov DKI membangun Rumah Sakit Kanker di bekas lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, terancam batal. Pasalnya, berdasarkan temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) anggaran 2014, ditemukan indikasi penggelembungan harga beli lahan senilai Rp 191 miliar.

"Yang saya enggak terima adalah kasus (pembelian lahan) Rumah Sakit Sumber Waras. BPK sekarang menemukan, beli tanah 3 hektar di sana harganya kemahalan Rp 191 miliar. Dari mana kemahalannya? Dia (BPK) bandingkan dengan NJOP (nilai jual objek pajak) di belakang (rumah sakit)," kata Ahok. (suf/Tribun/Ant)

Alasan BPK Keluarkan Opini WDP untuk DKI Jakarta:

- Saldo piutang pajak bumi dan bangunan—pedesaan dan perkotaan—tidak dapat ditelusuri, dan koreksi pencatatan yang dilakukan Pemprov DKI tidak didukung dokumen sumber.
- Saldo piutang pajak kendaraan bermotor senilai Rp 20,14 miliar tidak didukung data wajib pajak, jenis kendaraan, nilai jual kendaraan bermotor, dan masa pajak terutang yang lengkap dan akurat.
- Rekomendasi BPK pada temuan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya terkait aset yang bersifat tetap belum ditindaklanjuti secara memadai oleh Pemprov DKI.
- Penghapusan aset tetap senilai Rp 168,01 miliar tidak berdasarkan usulan penghapusan dari SKPD pengguna barang dan SK penghapusan dari gubernur. Perbedaan data nilai penghapusan aset yang dihapuskan di BPKD dan koreksi pencatatan atas saldo aset yang dihapuskan tidak dapat ditelusuri.
- Pengendalian pencatatan dan pengamanan aset lainnya—kemitraan dengan pihak ketiga senilai Rp 3,58 triliun—kurang memadai sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran pencatatannya dan berisiko terhadap keamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta.
- Rekomendasi BPK pada temuan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 agar Pemprov DKI menerapkan mekanisme penggunaan uang persediaan dengan menggunakan sistem revolving fund belum dilaksanakan sehingga BPK masih menemukan pencatatan belanja pada 15 SKPD senilai Rp 268,87 miliar tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
- Pencatatan realisasi biaya operasional pendidikan berupa belanja pegawai senilai Rp 249,10 miliar dan belanja barang jasa senilai Rp 1,27 triliun hanya berdasar data jumlah dana yang ditransfer ke sekolah, bukan berdasar bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di sekolah.



LAPORAN KEUANGAN — Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Wagub Djarot Saiful Hidayat menjelang Rapat Paripurna DPRD, menetapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, Senin (6/7)

BAGAIMANA SEBENARNYA LAPORAN KEUANGAN PEMPROV DKI SELAMA INI?

